

---

## Analisis Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

*Budget Efficiency Analysis of the Road Maintenance of Palu City in the Department of Bina Marga and Regional Spatial Arrangement of Central Sulawesi Province*

<sup>1</sup>Ali Sinjar\*, <sup>2</sup>Burhanuddin, <sup>3</sup>Dicky Yusuf

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu

(\*)email korespondensi: [ali.sinjar@gmail.com](mailto:ali.sinjar@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui dan menganalisis Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 48,61% dan pada tahun 2018 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan sangat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan angka 29,36%. Tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 96,40%, termasuk dalam kategori efektif dan pada tahun 2018 sebesar 100% kategori sangat efektif.

**Kata Kunci:** Efisiensi dan Efektivitas

---

### Abstract

*This research aims: to know and analyze the efficiency of maintenance budget of the city of Palu in the Department of Highways and the arrangement of central Sulawesi province room. The results showed that in 2017 the use of budget on the maintenance of provincial roads in the city of Palu shows the efficiency of budget conducted by the Dinas Bina Marga and regional spatial arrangement of central Sulawesi province with a total of 48.61% and in 2018 the use of budget on the maintenance of provincial road in Palu City showed very budget efficiency done by Dinas Bina Marga and regional spatial arrangement 29.36 of central Sulawesi The effectiveness rate in 2017 amounted to 96.40%, belonging to the effective category and by the year 2018 of 100% the category was very effective.*

**Keywords:** efficiency and effectiveness

---

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 menyatakan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana—rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat daerah. Pembangunan dan peningkatan jalan dalam perencanaan dan pelaksanaan harus dapat memenuhi persyaratan yang ada yaitu tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, karena organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, serta institusi yang selalu merugi. Jadi pada intinya *good governance* seperti yang banyak diharapkan masyarakat Indonesia akan segera dapat terwujud apabila pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya berpegang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 yang memiliki tiga prinsip dasar yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada dasarnya perencanaan umur perkerasan jalan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lalu lintas, umumnya didesain dalam kurun waktu antara 10-20 tahun, artinya jalan diharapkan tidak akan mengalami kerusakan dalam 5 tahun pertama. Tetapi jika pada realita yang adajalan sudah rusak sebelum 5 tahun pertama maka bisa dipastikan jalan akan mengalami masalah besar dikemudian hari (Hardiyatmo,2007).

Kemantapan jalan nasional Provinsi Sulawesi Tengah masuk urutan ke-10 dari 13 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan kemantapan jalan provinsi di urutan ke 12. Sejak dibentuk tahun 2012, Dinas Bina Marga yang sekarang telah berganti nama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil pemekaran dari Dinas Pekerjaan Umum, terus bergerak cepat melaksanakan program kemantapan jalan. Hasilnya, kemantapan jaringan jalan primer di akhir tahun 2012 dan kemantapan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 84,4 persen dari panjang total 2.181.95 kilometer. Sedangkan kemantapan jalan provinsi baru mencapai 55,03 persen dari panjang total 1.619.26 kilometer.

Dalam mewujudkan suatu metode penetapan prioritas penanganan pemeliharaan jalan di Kota Palu dalam upaya agar dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi tercapainya fungsi yang optimal terhadap jaringan jalan di Kota Palu dalam menunjang perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu diidentifikasi proses penyusunan kebijakan dalam pembiayaan pemeliharaan jalan Kota Palu.

Pengendalian secara terpadu untuk seluruh proses kontruksi pemeliharaan jalan yang dilakukan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terutama dengan adanya keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya harus ditunjang dengan upaya koordinasi dan pengorganisasian yang baik, guna menetapkan standar untuk pencapaian pemeliharaan jalan serta kondisi kemantapan jalan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: apakah Efisiensi Anggaran sudah efektif dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah?

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Arikunto (2003:309) mengemukakan: “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan”. Penelitian dilakukan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Bidang Jalan dan Jembatan, dengan alamat Jalan Towua. Kegiatan penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2019.

Analisis data dilakukan setelah data tersebut diperoleh dari penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil kesimpulan dan pemecahan terhadap masalah yang berhubungan dengan nilai tambah ekonomi dalam Analisis Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, digunakan Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Dalam penelitian ini ada dua pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran nilai efisiensi dan pengukuran nilai hasil (*earned value*). Menurut Aven Purwanto Sauri (2014 : 26-28). Berikut penjelasan mengenai pengukuran nilai efisiensi dan pengukuran nilai hasil (*earned value*) :

### Pengukuran Nilai Efisiensi

Nilai Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output dan input.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemeliharaan Jalan}}{\text{Alokasi Biaya Pemeliharaan Jalan}} \times 100\%$$

dimana :

- 0 – 30 % (Kategori sangat efisien)
- 31 – 60 % (Kategori efisien)
- 61 – 100 % (Kategori kurang efisien)
- > 100% (Kategori tidak efisien)

### Pengukuran Nilai Efektivitas / Nilai Hasil (*Earned Value*)

Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut.:

$$\text{Efektif} = \frac{\text{outcome (realisasi belanja)}}{\text{output (target belanja)}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- > 100 % (Kategori sangat efektif)
- 90 – 100 % (Kategori efektif)
- 80 – 90 % (Kategori cukup efektif)
- 60 – 80 % (Kategori kurang efektif)
- < 60 % (Kategori tidak efektif)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengukuran Efisiensi

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pemeliharaan jalan provinsi yang ada di Kota Palu. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan provinsi di Kota Palu terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Anggaran Pemeliharaan Jalan Provinsi Di Kota Palu 2017**

Bulan	Anggaran Pemeliharaan Jalan	Anggaran Pemeliharaan Jalan Kota Palu
Februari – Maret	2.082.230.781	791.942.240
Mei – Juni	2.082.230.781	791.942.240
Agustus – September	2.082.230.781	791.942.240
November – Desember	2.752.624.139	1.338.108.080

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2019.

Berdasarkan data tabel 1 (lampiran), tentang anggaran yang digunakan dalam melakukan efisiensi pemeliharaan jalan wilayah kota Palu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemeliharaan Jalan}}{\text{Alokasi Biaya Pemeliharaan Jalan}} \times 100\%$$

$$\text{Bulan Februari – September} : \frac{791.942.240}{2.082.230.781} \times 100\% = 38,03 \quad \text{efisien}$$

$$\text{Bulan Februari – September} : \frac{1.338.108.080}{2.752.624.139} \times 100\% = 48,61 \quad \text{efisien}$$

Dari hasil perhitungan efisiensi diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 38,03% kategori efisein pada bulan Februari-September 2017 dan pada bulan November-Desember 2017 dengan jumlah 48,61% kategori efisien.

**Tabel 2. Anggaran Pemeliharaan Jalan Provinsi Di Kota Palu 2018**

Bulan	Anggaran Pemeliharaan Jalan	Anggaran Pemeliharaan Jalan Kota Palu
Februari – Maret	2.176.809.240	794.560.000
Mei – Juni	1.609.149.240	794.560.000
Agustus – September	1.609.149.240	794.560.000
November – Desember	3.643.623.990	1.070.060.000

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2019.

Berdasarkan tabel 2 tentang anggaran yang digunakan dalam melakukan efisiensi pemeliharaan jalan wilayah kota Palu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemeliharaan Jalan}}{\text{Alokasi Biaya Pemeliharaan Jalan}} \times 100\%$$

$$\text{Bulan Februari – Maret} : \frac{794.560.000}{2.176.809.240} \times 100\% = 36,50 \quad \text{efisien}$$

$$\text{Bulan Mei – September} : \frac{794.560.000}{1.609.149.240} \times 100\% = 49,37 \quad \text{efisien}$$

$$\text{Bulan November – Desember} : \frac{1.070.060.000}{3.643.623.990} \times 100\% = 29,36 \quad \text{sangat efisien}$$

Keterangan :

- 0 – 30 % (Kategori sangat efisien)
- 31 – 60 % (Kategori efisien)
- 61 – 100 % (Kategori kurang efisien)
- > 100% (Kategori tidak efisien) menurut Both dalam Soamole (2007).

Dari hasil perhitungan efisiensi diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Februari-Maret dengan jumlah 49,37% kategori efisein, dan pada bulan November-Desember 2018 dengan jumlah 29,36% kategori sangat efisien.

Berdasarkan Penggunaan anggaran pada tahun 2017-2018 pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat dari keterangan penentuan kategori efisiensi anggaran menurut Both dalam Aven Purwanto Sauri (2014 : 26-28). Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Pola kerja bidang pemeliharaan jalan berlangsung secara normatif dengan mengikuti tahun anggaran. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, yang diawali dengan proses perencanaan pembangunan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan tahun anggaran berjalan perencanaan program dilakukan untuk rencana penanganan tahun berikutnya, proses program usulan diawali dengan identifikasi ruas-ruas jalan yang akan dilakukan penanganan pemeliharaan dengan memperhatikan catatan atau laporan tentang tingkat kerusakan jalan ruas-ruas jalan kabupaten secara umum. Selanjutnya dilakukan survei, investigasi, pengukuran serta data lain yang terkait. Perencanaan teknis selalu dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah baik survei lapangan maupun pelaksanaan perhitungan teknis sampai kepada perhitungan rencana anggaran biaya.

Dalam upaya mengefisienkan pembiayaan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya jalan provinsi yang ada di Kota Palu, maka dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan prioritas kebutuhan sesuai dengan tingkat desakan pelaksanaan. Penentuan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, sedangkan untuk pemeliharaan berkala jenis kegiatan penanganannya telah ditentukan pada tahapan pemrograman dan tahapan pelaksanaan. Adanya keterbatasan baik yang dipandang dari segi pembiayaan dan sumber daya (baik manusia maupun alam), maka usulan pemeliharaan jalan yang direncanakan pada implementasinya belum mampu direalisasikan sepenuhnya.

Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, *performance* dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Manfaat efisiensi yang dirasakan masyarakat adalah pada sektor pelayanan, jika masyarakat telah memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya paling minimal. Biaya yang disebutkan adalah waktu, tenaga atau bahkan uang.

### Pengukuran Nilai Efektivitas

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Indikator efektifitas adalah rasio antara realisasi penggunaan anggaran pemeliharaan jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target belanja. Efektivitas lebih menitikberatkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat daerah dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Berdasarkan data tabel 3 tentang anggaran yang digunakan dalam melakukan efektifitas pemeliharaan jalan wilayah kota Palu sebagai berikut :

$$\text{Efektif} = \frac{\text{outcome (realisasi belanja)}}{\text{output (target belanja)}} \times 100\%$$

Standar efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- > 100 % (Kategori sangat efektif)
- 90 – 100 % (Kategori efektif)
- 80 – 90 % (Kategori cukup efektif)
- 60 – 80 % (Kategori kurang efektif)
- < 60 % (Kategori tidak efektif)

Bulan Februari – Maret : $\frac{111.113.450}{791.942.240} \times 100\% = 14,03$	Tidak efektif
Bulan Mei – Juni : $\frac{285.413.450}{791.942.240} \times 100\% = 36,03$	Tidak efektif
Bulan Agustus – September : $\frac{672.761.450}{791.942.240} \times 100\% = 84,95$	Cukup efektif
Bulan November – Desember : $\frac{1.338.001.450}{1.338.108.080} \times 100\% = 99,99$	Efektif

Berdasarkan hasil diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2017 bahwa pada Triwulan I dan Triwulan II proses pemeliharaan jalan pada Kota Palu belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan proses pencairan anggaran maupun manajemen pengelolaan anggaran belum berjalan dengan baik, nanti pada saat Triwulan III dan Triwulan IV sudah berjalan cukup efektif dan efektif.

**Tabel 4. Anggaran Pemeliharaan Jalan Provinsi Di Kota Palu 2018**

Bulan	Anggaran Pemeliharaan Jalan Kota Palu	Realisasi Anggaran Pemeliharaan Jalan Kota Palu
Februari – Maret	794.560.000	60.805.000
Mei – Juni	794.560.000	448.105.000
Agustus – September	794.560.000	745.035.000
November – Desember	1.070.060.000	1.069.575.000

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2019.

Berdasarkan data tabel 4 tentang anggaran yang digunakan dalam melakukan efektifitas pemeliharaan jalan wilayah kota Palu sebagai berikut :

$$\text{Efektif} = \frac{\text{outcome (realisasi belanja)}}{\text{output (target belanja)}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- > 100 % (Kategori sangat efektif)
- 90 – 100 % (Kategori efektif)
- 80 – 90 % (Kategori cukup efektif)
- 60 – 80 % (Kategori kurang efektif)
- < 60 % (Kategori tidak efektif)

Bulan Februari – Maret : $\frac{60.805.000}{794.560.000} \times 100\% = 7,65$	Tidak efektif
Bulan Mei – Juni : $\frac{448.105.000}{794.560.000} \times 100\% = 56,39$	Tidak efektif
Bulan Agustus – September : $\frac{745.035.000}{794.560.000} \times 100\% = 93,76$	Efektif
Bulan November – Desember : $\frac{1.070.060.000}{1.069.575.000} \times 100\% = 99,95$	Efektif

Berdasarkan hasil diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2018 bahwa pada Triwulan I dan Triwulan II proses pemeliharaan jalan pada Kota Palu belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan proses pencairan anggaran maupun manajemen pengelolaan anggaran belum berjalan dengan baik, nanti pada saat Triwulan III dan Triwulan IV sudah berjalan efektif.

Tingkat efektivitas penggunaan anggaran dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan provinsi khususnya mampu mengelola pemeliharaan jalan provinsi yang ada di Kota Palu, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat analisis efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan jalan bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah provinsi.

Pelayanan umum kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dalam pemeliharaan Jalan Provinsi yang terkoordinasi dan termanage dengan baik dan efisien serta efektif, hal tersebut didasari bahwa peran jalan merupakan salah satu obyek utama dalam menunjang setiap aktifitas masyarakat.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi instansi yang membaca atau mengetahui keinginan dari masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan dan kinerja jalan yang mampu mengantisipasi apa yang masyarakat inginkan dimasa yang akan datang. Maka pengaturan kebijakan yang tepat dan kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang kuat dalam mengelola kelembagaan dan sumberdaya secara efektif dan efisien dengan sendirinya akan membentuk suatu organisasi pelaksana pembiayaan pemeliharaan jalan yang kuat.

Di Indonesia pengelompokan jalan diatur di UU No. 22 Tahun 2009. Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintahan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antaribu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas mengenai efisiensi dan efektivitas pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah khususnya jalan provinsi yang ada di Kota Palu maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Besarnya Anggaran sangat mendukung pemeliharaan jalan provinsi yang ada di kota Palu, dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2017-2018 setiap tahun mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan anggaran dalam pemeliharaan jalan. 2) Pada tahun 2017 Dari hasil perhitungan efisiensi menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 38,03% kategori efisien pada bulan Februari-September 2017 dan pada bulan November-Desember 2017 dengan jumlah 48,61% kategori efisien. Sedangkan

pada perhitungan efektifitas pada tahun 2017 pada Triwulan I dan Triwulan II proses pemeliharaan jalan pada Kota Palu belum berjalan efektif, nanti pada saat Triwulan III dan Triwulan IV sudah berjalan cukup efektif dan efektif. 3) Pada tahun 2018 Dari hasil perhitungan efisiensi diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penggunaan anggaran pada pemeliharaan jalan propinsi di Kota Palu menunjukkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Februari-Maret dengan jumlah 49,37% kategori efisein, dan pada bulan November-Desember 2018 dengan jumlah 29,36% kategori sangat efisien. Sedangkan pada perhitungan efektifitas pada tahun 2017 pada Triwulan I dan Triwulan II proses pemeliharaan jalan pada Kota Palu belum berjalan efektif, nanti pada saat Triwulan III dan Triwulan IV sudah berjalan efektif.

#### SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran pemeliharaan jalan harus berjalan bersama. Dengan kata lain, seiring dengan pengelolaan anggaran pemeliharaan yang baik dikelola oleh pemerintah berdampak efisien dan efektif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya jalan provinsi. Apa yang menjadi target dari pemerintah terhadap peningkatan sarana dan prasarana khususnya jalan dirasakan oleh masyarakat. Maka perlu pula dilakukan pengawasan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawasi kinerja dilapangan pengerjaan pemeliharaan jalan provinsi khususnya di Kota Palu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aven Purwanta Sauri. 2014. Analisis Efisiensi dan Efektitas Penggunaan Anggaran Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur. Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hardiyatmo, H.C. 2007. *Pemeliharaan Jalan Raya*. Gajah Mada University. Press, Yogyakarta.
- Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Keputusan Dalam Negeri. 1996. *Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penertbit. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES, Yogyakarta.
- Priyonggo, Suseno. 2008. "Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1. Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Rochajat, Harun dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih. 2012. Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 2. Hal. 284-294.
- Siagian, S. P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta.

Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Alfabeta. Bandung.

Stoner, James.A.F. 2010. *Management*, Prentice Hall International, Inc Englewood Cliffs, New York.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 *tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 13/PRT/M/2011 *tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*.